



**SALINAN**

**WALIKOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DEPOK  
TAHUN 2016 – 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
18. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK**  
**Dan**  
**WALIKOTA DEPOK**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 – 2021.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
4. Walikota adalah Walikota Depok.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah OPD Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perencanaan Pembangunan di Kota Depok.
7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
8. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pusat di Daerah.

9. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil Pembangunan.
10. Dunia Usaha adalah usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Perencanaan adalah suatu Proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Perencanaan Pembangunan Tahunan adalah proses Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen Perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Jangka Panjang Kota Depok.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Depok adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kota Depok untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-OPD, adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

19. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan Visi Daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir Periode Perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
22. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan Program-program Indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
24. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mewujudkan Visi dan misi.
25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh OPD.
26. Indikator Kinerja adalah alat ukur Spesifik secara kuantitatif dan/atau Kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau Darnpak yang menggambarkan tingkat capaian Kinerja suatu kegiatan.
27. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan :

- a. Penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan umum, Program Prioritas Kepala Daerah dan arah Kebijakan Keuangan daerah dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025; dan
- b. dokumen Perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Maksud dan tujuan penetapan RPJM Daerah adalah untuk menetapkan pedoman Perencanaan sebagai acuan dalam :

- a. penyusunan Renstra-OPD, RKPD, Renja-OPD dan Perencanaan Penganggaran; dan
- b. mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota serta dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.



**BAB IV**  
**SISTEMATIKA**

**Pasal 4**

Sistematika RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 meliputi :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan Hukum, hubungan antar Dokumen, Sistematika Penyusunan, Maksud dan Tujuan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK**

Memuat telaahan terhadap kondisi Kota Depok dari aspek Geografi dan Demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

**BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA DEPOK**

Memuat Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap Kinerja keuangan masa lalu, kebijakan Pengelolaan Keuangan masa lalu dan Kerangka pendanaan.

**BAB IV : ISU-ISU STRATEGIS**

Memuat tantangan dan permasalahan Pembangunan yang akan dihadapi selama 5 (lima) tahun dan Isu Strategis.

**BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Memuat Visi dan Misi Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran dari misi tersebut.

**BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat dan menjelaskan arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja serta tahapan pencapaian.

**BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Menjelaskan hubungan antara Kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan Strategi yang dipilih dengan target Capaian Indikator Kinerja dan program Pembangunan Daerah.

## **BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN**

Menjelaskan Rencana Program Prioritas serta Kebijakan Keuangan Daerah untuk memenuhi Kebutuhan Pendanaan selama 5 (lima) tahun.

## **BAB IX : INDIKATOR KINERJA DAERAH**

memuat Indikator Kinerja Daerah yang memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan daerah, dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Ukuran keberhasilan ditunjukkan dari akumulasi pencapaian Indikator *Outcome* Program Pembangunan Daerah setiap tahun sehingga kondisi Kinerja yang diinginkan pada akhir Periode RPJMD dapat dicapai.

## **BAB X : PENUTUP**

### **BAB V**

#### **ISI DAN URAIAN RPJM DAERAH**

##### **Pasal 5**

Isi dan uraian RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB VI**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021.
- (2) Tata cara pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah Kota Depok 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 11 Agustus 2016

**WALIKOTA DEPOK,**

**TTD**

**KH. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 11 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**HARRY PRIHANTO**  
**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 7**  
**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:**  
**(8/145/2016)**

SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK

**N. LIENDA RAEN NURDIANNY, SH., M.Hum**  
**NIP. 197001271998032004**



**DAFTAR ISI**

	Halaman
Daftar Isi .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Hubungan Dokumen RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kota Depok.....	9
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK .....</b>	<b>11</b>
2.1. Aspek Geografis dan Demografis Kota Depok .....	11
2.1.1. Aspek Geografis Kota Depok .....	11
2.1.2. Kondisi Demografis Kota Depok .....	25
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok .....	30
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	30
2.2.1.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	30
2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	32
2.2.1.3. PDRB perkapita daerah dan Gini Ratio .....	36
2.2.1.4. Tingkat Kemiskinan .....	46
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .....	48
2.3. Aspek Pelayanan Umum .....	56
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib. ....	57
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan .....	85
2.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	90
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	90
2.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi .....	91
2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia .....	93
<b>BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>96</b>
3.1. Kinerja Pelaksanaan APBD.....	96
3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah .....	96
3.1.1.1. Kinerja Pajak Daerah.....	100
3.1.1.2. Kinerja Retribusi Daerah .....	101
3.1.1.3. Kinerja Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.....	103



3.1.1.4.	Kinerja Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	104
3.1.2.	Dana Perimbangan.....	106
3.1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	107
3.1.4.	Kinerja Belanja Daerah.....	108
3.1.4.1.	Kebijakan Umum Belanja Daerah.....	108
3.1.4.2.	Proporsi Belanja Daerah.....	109
3.2.	Pengelolaan Pembiayaan Daerah.....	112
3.2.1.	Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah.....	112
3.2.2.	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah .....	113
3.2.3.	Neraca Daerah.....	114
3.3.	Kerangka Pendanaan.....	119
3.3.1.	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021.....	119
3.3.2.	Proyeksi Belanja Daerah.....	120
3.3.3.	Proyeksi Pembiayaan Daerah.....	122
<b>BAB IV</b>	<b>ISU STRATEGIS KOTA DEPOK.....</b>	<b>127</b>
4.1.	Isu Nasional dan internasional.....	128
4.1.1.	RPJPN dan RPJMN .....	128
4.1.2.	RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.....	133
4.1.3.	Evaluasi RPJPD Kota Depok tahun 2006-2025 (tahap I dan II) .....	134
4.2.	Isu-isu Internasional.....	139
4.2.1.	<i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> .....	139
4.2.2.	<i>Kerjasama Internasional</i> .....	139
4.2.3.	<i>Krisis Global</i> .....	140
4.2.4.	Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya.....	142
4.3.	Penetapan Isu Strategis.....	143
4.3.1.	Infrastruktur.....	144
4.3.2.	Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi .....	148
4.3.3.	Kualitas Lingkungan Hidup .....	170
4.3.4.	Ekonomi Kreatif dan UMKM Berbasis Potensi Lokal....	171
4.3.5.	Tata Kota.....	177
4.3.6.	Ketahanan Keluarga dan Sosial Kemasyarakatan.....	182
4.3.7.	Ketimpangan.....	186
4.3.8.	Kemiskinan dan Pengangguran .....	187
4.3.9.	Kesehatan .....	193
4.3.10.	Kualitas Sumber Daya Manusia .....	195
<b>BAB V</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>204</b>
5.1.	Arahan RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025.....	204
5.2.	Visi dan Misi RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021.....	212



5.3.	Tujuan dan Sasaran.....	216
5.4.	Program Unggulan Depok.....	225
5.4.1	Depok Kota Sehat atau Smarthealthy City .....	225
5.4.2	Depok Kota Bersih atau Zero Waste City .....	229
5.4.3	Depok Kota Ramah Keluarga atau <i>Family Friendly City</i> .....	236
5.5.	Janji Walikota dan Wakil Walikota .....	241
<b>BAB</b>	<b>VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>244</b>
<b>BAB</b>	<b>VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS .....</b>	<b>264</b>
<b>BAB</b>	<b>VIII INDIKATOR RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN.....</b>	<b>287</b>
8.1.	Janji Kepala Daerah.....	287
8.2.	Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan Daerah .....	287
8.3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah .....	288
<b>BAB</b>	<b>IX INDIKATOR KINERJA DAERAH .....</b>	<b>335</b>
<b>BAB</b>	<b>X PENUTUP .....</b>	<b>354</b>
	Daftar Tabel .....	iv
	Daftar Grafik .....	x
	Daftar Gambar .....	xv

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Depok Menurut Kecamatan .....	12
Tabel 2.2 Sebaran dan Luas Situ di Kota Depok .....	16
Tabel 2.3 Penggunaan Lahan Tahun 2012 .....	18
Tabel 2.4 Rencana Struktur Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032.....	21
Tabel 2.5 Rencana Pola Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032.....	24
Tabel 2.6 Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Kepadatan di Kota Depok Tahun 2015.....	26
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Persentase dan Sex Ratio di Kota Depok Tahun 2015.....	27
Tabel 2.8 Distribusi Presentase PDRB Kota Depok Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (ADHB) (dalam %) .....	35
Tabel 2.9 PDRB Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi PDRB dan Gini Rasio Kota Depok Tahun 2010-2014.....	36
Tabel 2.10 Kondisi Perekonomian Kecamatan di Kota Depok Tahun 2014.....	42
Tabel 2.11 Kemiskinan Kota Depok Tahun 2011-2015.....	47
Tabel 2.12 Perkembangan APM Kota Depok Tahun 2011-2015 (dalam %) .....	50
Tabel 2.13 Perkembangan APK Kota Depok Tahun 2011-2015...	51
Tabel 2.14 Capaian IKM Kota Depok Tahun 2011-2015 .....	57
Tabel 2.15 Hasil Kinerja Urusan Pendidikan Pemerintah Daerah Kota Depok Periode 2011-2015 .....	58



Tabel 2.16	Hasil Kinerja Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kota Depok Periode 2012-2015 .....	62
Tabel 2.17	Daftar Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan (Km) Di Kota Depok Sampai dengan Tahun 2015.....	64
Tabel 2.18	Hasil Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kota Depok Periode 2012-2015.....	65
Tabel 2.19	Penanganan Titik Macet dalam 5 tahun Terakhir.....	66
Tabel 2.20	Hasil Kinerja Urusan Perencanaan Pemerintah Daerah Kota Depok Periode 2012-2015 .....	70
Tabel 2.21	Lintasan dan Jumlah Angkutan Kota Tahun 2014....	70
Tabel 2.22	Hasil Kinerja Urusan Perhubungan Pemerintah Daerah Kota Depok Periode 2012-2015 .....	72
Tabel 2.23	Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kota Depok Periode 2012-2015.....	72
Tabel 2.24	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Depok Tahun 2010-2014 .....	74
Tabel 2.25	Hasil Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Depok Periode 2012-2015 .....	75
Tabel 2.26	Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kota Depok.....	76
Tabel 2.27	Hasil Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pemerintah Daerah Kota Depok.....	76





Tabel 2.28	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama Di Kota Depok, Tahun 2014 .....	77
Tabel 2.29	TPAK, TPT dan TKK Tahun 2011-2013 Di Kota Depok.....	78
Tabel 2.30	Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas) Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama di Kota Depok Tahun 2014(dipublikasikan tahun 2015).....	79
Tabel 2.31	Hasil Kinerja Urusan Keluarga KUMKM Pemerintah Daerah Kota Depok.....	80
Tabel 2.32	Hasil Kinerja Urusan Otonomi Daerah Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2012-2015.....	81
Tabel 2.33	Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Kota Depok .....	84
Tabel 2.34	Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Daerah Kota Depok.....	84
Tabel 2.35	Hasil Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kota Depok.....	85
Tabel 2.36	Indikator dan Capaian Program Peningkatan Produksi dan Penganekaragaman Konsumsi pangan .....	86
Tabel 2.37	Hasil Kinerja Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kota Depok .....	87
Tabel 2.38	Hasil Kinerja Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kota Depok .....	87
Tabel 2.39	Hasil Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kota Depok.....	88
Tabel 2.40	Hasil Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kota Depok .....	88



Tabel 2.41	Hasil Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kota Depok .....	90
Tabel 2.42	Realisasi Perizinan Dari Tahun 2009-2014 .....	92
Tabel 2.43	Rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Depok.....	93
Tabel 2.44	Rasio Ketergantungan di Kota Depok.....	94
Tabel 2.45	Rekapitulasi Capaian IPM Kota Depok Tahun 2009-2015.....	95
Tabel 2.46	Nilai IPM Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2015.....	95
Tabel 3.1.	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 – 2015 .....	99
Tabel 3.2.	Realisasi Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2011-2015 Kota Depok.....	101
Tabel 3.3.	Realisasi Retribusi Daerah Kota Depok Tahun 2011-2015 .....	102
Tabel 3.4.	Realisasi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Yang Dipisahkan Tahun 2011-2015.....	103
Tabel 3.5.	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2011-2015.....	104
Tabel 3.6.	Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2011-2015.....	106
Tabel 3.7.	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2011-2015.....	107
Tabel 3.8.	Nilai Belanja Daerah Kota Depok .....	110
Tabel 3.9	Realisasi Pembiayaan Kota Depok Tahun Anggaran 2011-2015.....	113
Tabel 3.10	Neraca Daerah Kota Depok Tahun 2010-2014.....	115
Tabel 3.11	Hasil Perhitungan Neraca Daerah Kota Depok.....	117



Tabel 3.12	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2021.....	124
Tabel 3.13	Proyeksi APBD Tahun 2016-2021.....	125
Tabel 4.1.	Identifikasi Kebijakan RPJPD Daerah lain.....	142
Tabel 4.2.	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Depok Tahun 2026.....	158
Tabel 4.3.	Estimasi Nilai Jasa Pemerintahan Umum di Kota Depok.....	167
Tabel 4.4.	Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sektor Kota Depok Tahun 2009-2014.....	169
Tabel 4.5.	PDRB Kreatif Kota Depok dan Laju Pertumbuhan ekonomi kreatif Tahun 2013.....	173
Tabel 4.6.	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal Tahun 2006-2013.....	177
Tabel 4.7.	Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kota Depok Tahun 2011-2026.....	178
Tabel 4.8.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Depok Tahun 2006-2013.....	179
Tabel 4.9.	Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas) Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama di Kota Depok Tahun 2013 .....	191
Tabel 4.10.	Nilai IPM Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2015.....	197
Tabel 5.1.	Keselarasan Misi RPJPD Kota Depok tahun 2006-2025 Dengan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021.....	215
Tabel 5.2.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Depok.....	221



Tabel 5.3.	Tahapan Pembangunan Infrastruktur Persampahan Kota Depok.....	233
Tabel 5.4.	Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.....	242
Tabel 6.1.	StartegidanarahkebijakanMisi I.....	247
Tabel 6.2.	StartegidanarahkebijakanMisiII.....	249
Tabel 6.3.	StartegidanarahkebijakanMisiIII.....	256
Tabel 6.4.	StartegidanarahkebijakanMisiIV.....	258
Tabel 6.5.	StartegidanarahkebijakanMisiV.....	262
Tabel 7.1.	Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi I.....	265
Tabel 7.2.	Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi II.....	269
Tabel 7.3.	Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi III.....	276
Tabel 7.4.	Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi IV.....	280
Tabel 7.5.	Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi V.....	285
Tabel 8.1.	Indikasi Rencana Program Prioritas.....	290
Tabel 9.1.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Misi RPJMD 2016-2021.....	338
Tabel 9.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan UrusanPemerintahan.....	342

**DAFTAR GRAFIK**

	Halaman
Grafik 2.1 Perkembangan Penduduk Kota Depok Tahun 2010-2015 .....	27
Grafik 2.2 Komposisi Penduduk Kota Depok menurut Kelompok Usia .....	28
Grafik 2.3 Tren Jumlah Penduduk Kota Depok sampai 2025 ....	29
Grafik 2.4 Komposisi Penduduk Kota Depok menurut Lapangan Usaha Tahun 2015.....	29
Grafik 2.5 Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas Yang Tidak Sekolah Lagi menurut Ijazah yang dimiliki Tahun 2015 .....	30
Grafik 2.6. PDRB Kota Depok Tahun 2010 – 2014 (dalam juta rupiah) .....	32
Grafik 2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2010-2014 (dalam %) .....	32
Grafik 2.8. Distribusi PDRB Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2010 – 2014(ADHB) (dalam %).....	34
Grafik 2.9. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa Tahun 2008-2015 (dalam %) .....	38
Grafik 2.10. Kontribusi Industri Kreatif terhadap PDRB Kota Depok Tahun 2014.....	41
Grafik 2.11. Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) dan Tingkat Kemiskinan (%) Kota Depok Tahun 2008 – 2014.....	47
Grafik 2.12. Angka Melek Huruf Kota Depok Tahun 2010 – 2015.....	49
Grafik 2.13. Rata-Rata Lama Sekolah Kota Depok Tahun 2010 – 2015 (tahun).....	50
Grafik 2.14. Nilai AHH Kota Depok Tahun 2009 – 2014 .....	52



Grafik 2.15. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Tahun 2011 – 2015 .....	54
Grafik 2.16. Prevalensi Gizi buruk/ Persentase Balita Gizi Buruk (%) Tahun 2011 – 2014.....	54
Grafik 2.17. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100ribu kelahiran hidup Tahun 2011 – 2015 .....	55
Grafik 2.18. Perkembangan Prasarana Olahraga Kota Depok .....	56
Grafik 2.19. Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Kota Depok Tahun Periode 2011-2015 .....	59
Grafik 2.20. Perkembangan Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Kota Depok Tahun 2011-2015.....	60
Grafik 2.21. Angka Melanjutkan ke SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Kota Depok Tahun 2011-2015.....	60
Grafik 2.22. Jumlah Posyandu Kota Depok Tahun 2012-2015 .....	62
Grafik 2.23. Jenis Penertiban Satpol PP Tahun 2014 .....	81
Grafik 2.24. Daya Beli Masyarakat Kota Depok Tahun 2009-2014.....	90
Grafik 2.25. Pola Konsumsi Masyarakat Kota Depok Tahun 2007-2014.....	91
Grafik 2.26. IPM Kota Depok dan Propinsi Jawa Barat Tahun 2010 - 2015 .....	95
Grafik 3.1. Komponen Pendapatan Daerah.....	100
Grafik 3.2. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2011-2015 .....	101
Grafik 3.3. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2011-2014.....	102
Grafik 3.4. Realisasi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal yang Dipisahkan Tahun 2011-2015.....	103
Grafik 3.5. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2011-2015 .....	105



Grafik 3.6. Derajat Kemandirian dan Rasio Ketergantungan Daerah Tahun 2011-2015.....	107
Grafik 3.7. Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2011-2015.....	107
Grafik 3.8. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2011-2015 .....	108
Grafik 3.9. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011-2015.....	110
Grafik 3.10. Persentase Realisasi Belanja Daerah.....	112
Grafik 3.11. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Depok 2016-2021 .....	119
Grafik 3.12. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kota Depok 2016-2021 (Rupiah).....	120
Grafik 3.13. Proyeksi Belanja Daerah Kota Depok 2016 – 2021 (rupiah) .....	121
Grafik 3.14. Proyeksi Proporsi Belanja Tidak Langsung Kota Depok 2016 – 2021 (rupiah) .....	122
Grafik 3.15. Proyeksi Surplus/Defisit APBD Kota Depok 2016 – 2021 (dalam rupiah).....	122
Grafik 3.16. Proporsi Pendanaan Belanja Daerah Tahun 2016-2021.....	123
Grafik 4.1. Estimasi Perkembangan Panjang Jalan di Kota Depok.....	145
Grafik 4.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Sampai Dengan Tahun 2025 .....	149
Grafik 4.3. Estimasi Perkembangan PDRB Sampai Dengan Tahun 2025.....	149
Grafik 4.4. Estimasi Perkembangan Distribusi Presentase Sektor Sampai Dengan Tahun 2025 .....	150
Grafik 4.5. Proyeksi distribusi pertanian terhadap PDRB sampai dengan tahun 2025 .....	151



Grafik 4.6.	Proyeksi Perkembangan Produksi Belimbing Sampai Dengan Tahun 2025 .....	151
Grafik 4.7.	Proyeksi Perkembangan Produksi Belimbing Sampai Dengan Tahun 2025 .....	152
Grafik 4.8.	Proyeksi Perkembangan Produksi Ikan Air Tenang Sampai Dengan Tahun 2025 .....	152
Grafik 4.9.	Tren Perkembangan Kontribusi Sektor Sekunder Sampai Dengan Tahun 2025 .....	154
Grafik 4.10.	Perkembangan PDRB Industri Pengolahan di Kota Depok .....	155
Grafik 4.11.	Perkembangan Kebutuhan Listrik di Kota Depok .....	157
Grafik 4.12.	Perkembangan Jumlah Pemakaian Air Bersih Perpipaandi Kota Depok .....	158
Grafik 4.13.	Tren Perkembangan Distribusi Sektor Tersier Sampai Dengan Tahun 2025 .....	160
Grafik 4.14.	Perkembangan Persentase Tenaga Kerja Sektor Tersier di Kota Depok .....	161
Grafik 4.15.	Perkembangan Ekspor Kota Depok .....	162
Grafik 4.16.	Pertumbuhan Sektor Angkutan Kota Depok .....	165
Grafik 4.17.	Perkembangan Lapangan Usaha Bank & Lembaga Keuangan lainnya.....	166
Grafik 4.18.	Pertumbuhan Sektor Jasa Kota Depok .....	167
Grafik 4.19.	Perkembangan Lapangan Usaha Jasa-jasa di Kota Depok.....	168
Grafik 4.20.	Perkembangan Inflasi Kota Depok .....	170
Grafik 4.21.	Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial di Kota Depok.....	184
Grafik 4.22.	Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial Anak-anak di Kota Depok .....	185





Grafik 4.23. Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial Yang Dihadapi Wanita di Kota Depok sampai tahun 2025 .....	185
Grafik 4.24. Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial di Kota Depok sampai dengan Tahun 2025.....	186
Grafik 4.25. Perkembangan PDRB per Kapita di Kota Depok .....	186
Grafik 4.26. Proyeksi Indeks Gini Sampai Dengan Tahun 2025...	187
Grafik 4.27. Kecenderungan Jumlah Orang Miskin Sampai Dengan Tahun 2025 .....	187
Grafik 4.28. Kecenderungan Jumlah Orang Miskin Sampai Dengan Tahun 2025 .....	188
Grafik 4.29. Proyeksi Angkatan Kerja Hingga Tahun 2025 .....	192
Grafik 4.30. Nilai AHH Kota Depok Tahun 2010 – 2015.....	194
Grafik 4.31. Proyeksi Perkembangan IPM Kota Depok Sampai Dengan Tahun 2025 .....	196
Grafik 4.32. Perkembangan Kunjungan Pasien RSUD Kota Depok.....	199
Grafik 5.1. Penduduk dan Timbulan Sampah di Kota Depok Tahun 2007 – 2014 .....	229

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1.1. Pola Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	8
Gambar 2.1. Peta Wilayah Kota Depok.....	13
Gambar 2.2. Rencana Struktur Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032.....	20
Gambar 2.3. Rencana Pola Ruang Kota Depok Tahun 2012- 2032.....	23
Gambar 4.1. Sebaran Layanan Air Bersih Perpipaan di Kota Depok Tahun 2013.....	159
Gambar 5.1. Roadmap Menuju <i>Universal Health Coverage</i> .....	226
Gambar 5.2. Program Kota Sehat atau <i>Smart Healthy City</i> .....	227
Gambar 5.3. Prinsip Pengelolaan Kota Depok.....	232
Gambar 5.4. Sistem Pengelolaan Sampah Kota Depok .....	233
Gambar 5.5. Komponen Program Kota Bersih atau <i>Zero WasteCity</i> .....	234
Gambar 5.6. Elemen Kota Ramah Keluarga atau Ketahanan Keluarga.....	238
Gambar 5.7 Sistem Sosial Ketahanan Keluarga.....	238
Gambar 5.8 Program Ketahanan Keluarga Depok .....	239



# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan Daerah di Kota Depok dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan mengacu pada Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan produk perencanaan jangka menengah tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025.

RPJMD sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah. Program prioritas meliputi program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), program lintas OPD dan program kewilayahan. Proses penyusunannya menggunakan empat pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan suatu rencana karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye yang dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui



musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Kabupaten/Kota, kecamatan, dan Kelurahan.

RPJMD 2016 – 2021 ini disusun bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tataruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dokumen RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama enam bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 memiliki nilai Strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kota Depok dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2016-2021 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Selain itu, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai Strategis dan Politis, yaitu:



1. RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan pedoman Pembangunan selama 5 (lima) tahun.
3. RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD).
4. RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan alat atau instrument pengendalian
5. RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan instrument untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala OPD selama 5 (lima) tahun.
6. RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Provinsi.

## **I.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan Hukum, Perundang-undangan, dan Peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).



4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64).
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.
20. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat



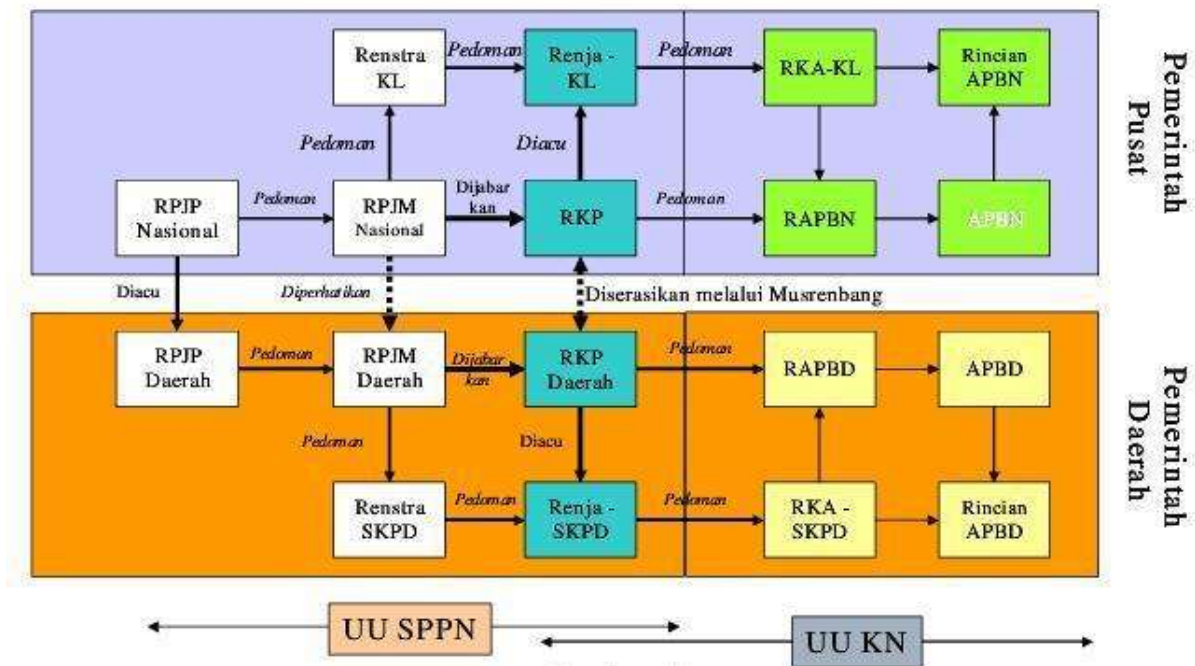


Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E).

23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5).
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 5).
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 9).
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1).

### **1.3. Hubungan Dokumen RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok 2006-2025 dengan tetap memperhatikan arahan RPJM Nasional 2010 – 2014 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018. Secara skematis, keterkaitan dokumen perencanaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1

### Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, RPJMD sebagai dokumen strategis perlu dijabarkan ke dalam kebijakan taktikal berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok, yang akan menjadi acuan bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD. RKPD Kota Depok akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kota Depok 2016-2021 terdiri dari 10 bab sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Hubungan Dokumen RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kota Depok



## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

## BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

- 3.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
- 3.2. Pengelolaan Pembiayaan Daerah
- 3.3. Kerangka Pendanaan

## BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 4.1. Isu Nasional dan internasional
- 4.2. Isu-isu Internasional
- 4.3. Penetapan isu Strategis

## BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

## BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS

## BAB VIII INDIKATOR RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN

## BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH

## BAB X PENUTUP

### **I.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kota Depok**

Maksud penyusunan RPJM Daerah Kota Depok 2016 – 2021 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen guna mewujudkan visi dan misi Kota Depok 2016– 2021 dan program pembangunan Walikota terpilih masa bakti 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.



Sedangkan tujuan penyusunan RPJM Daerah Kota Depok 2016 - 2021 adalah :

1. Mengidentifikasi perkembangan pembangunan dan Pemerintahan di Kota Depok dengan mempertimbangkan segala potensi dan Sumber Daya yang dimiliki Kota Depok.
2. Merumuskan visi dan misi Kota Depok yang akan dicapai melalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Pembangunan Daerah Jangka Menengah.
3. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro Kota Depok dan pilihan program prioritas setelah dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD.
4. Sebagai bahan acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis OPD (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) OPD dan perencanaan penganggaran.
5. Menyediakan rancangan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi Kinerja tahunan setiap OPD.
6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur.